BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian seperti halnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memberdayakan tenaga kerja, menyerap sumberdaya, meningkatkan segala pelayanan publik, meningkatkan produk-produk, serta mengembangkan dan memberdayakan usaha makro dan mikro. Perlunya pelaksanaan tersebut secara berkelanjutan untuk menghadapi era globalisasi.

Adapun keterbatasan yang ada, terkait anggaran dan anggaran-anggaran tersebut dibagi untuk semua bidang dan/atau sektor, timbul juga permasalahan ketika masyarakat memiliki kebutuhan terhadap fasilitas publik tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia. Maka dari itu penanaman modal juga memiliki peranan penting dan merupakan salah satu jalan alternatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yaitu memberdayakan, menyerap serta melibatkan pihak lain baik itu berupa pihak dalam negeri (lokal) maupun pihak asing.

Hukum penanaman modal ialah hubungan antar penanaman modal dengan penerima modal, dimana status penanaman modal dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal lokal. Di maksud penanaman modal asing yaitu penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan penanaman modal lokal merupakan penanam modal yang berasal dari

dalam negeri. Dalam bidang usahanya bermacam-macam bidang kegiatan yang dibolehkan untuk berinvestasi.

Tercapainya penyelenggaraan penanaman modal apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanam modal dapat diatasi mulai dari pencegahan, Adapun juga pemerintah melakukan perbaikan antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, birokrasi yang efisien, yang paling utama yaitu kepastian hukum di bidang penanaman modal. Penanam modal sebagai penggerak roda perekonomian dengan jalannya pembangunan, terciptanya lapangan kerja sehingga perlunya kemudahan didalam meningkatnya terealisasi penanam modal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi asing merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investor asing membawa modal, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup.

Pemberian hak istimewa kepada investor asing memiliki dampak positif dan negatif:

Dampak Positif:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- Transfer teknologi: Memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan daya saing: Meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Dampak Negatif:

- Kesenjangan ekonomi: Menimbulkan kesenjangan antara investor asing dan pengusaha lokal.
- Ketidakadilan dalam persaingan: Investor asing dengan hak istimewa memiliki keuntungan yang tidak dimiliki pengusaha lokal.
- Eksploitasi sumber daya alam: Berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak lingkungan.
- Pelanggaran hak asasi manusia: Berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat.

Pemberian hak istimewa kepada investor asing perlu dikaji berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa:

- Investor asing dan pengusaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.
- Hak-hak dan kepentingan pengusaha lokal dilindungi.
- Manfaat dari investasi asing didistribusikan secara adil dan merata.

Pemberian hak istimewa kepada investor asing harus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berarti:

- Investasi asing harus ramah lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam.
- Investor asing harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Manfaat dari investasi asing harus diinvestasikan kembali untuk pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Pemberian hak istimewa kepada investor asing merupakan isu kompleks yang menimbulkan berbagai permasalahan di Indonesia. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam berdasarkan prinsip keadilan dan hukum untuk memastikan terciptanya investasi yang adil dan berkelanjutan. Pemberian hak istimewa kepada investor asing dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara investor asing dan pengusaha lokal. Investor asing dengan hak istimewa memiliki keuntungan yang tidak dimiliki pengusaha lokal, seperti akses ke sumber daya yang lebih banyak, biaya yang lebih rendah, dan insentif fiskal. Hal ini dapat menyebabkan dominasi pasar oleh investor asing dan meminggirkan pengusaha lokal. Hak istimewa yang diberikan kepada investor asing dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan.

Investor asing dengan hak istimewa memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan tender proyek dan mendapatkan akses ke pasar. Hal ini dapat menyulitkan pengusaha lokal untuk bersaing dan berkembang. Pemberian hak istimewa kepada investor asing dalam sektor ekstraktif dapat berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak lingkungan.

Investor asing mungkin tidak memiliki komitmen yang sama terhadap kelestarian lingkungan seperti pengusaha local.

Pemberian hak istimewa kepada investor asing dalam sektor tertentu dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat. Investor asing mungkin tidak memiliki kepedulian yang sama terhadap hak-hak masyarakat lokal seperti pengusaha lokal. Regulasi terkait pemberian hak istimewa kepada investor asing di Indonesia seringkali tidak jelas dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan. Penegakan hukum terhadap investor asing yang melanggar aturan dan regulasi masih lemah. Hal ini dapat menyebabkan investor asing tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan merugikan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik dengan penelitian berjudul **“PENGARUH KEBIJAKAN TERHADAP PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEMBERIAN HAK ISTIMEWA KEPADA INVESTOR ASING DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaturan Terkait Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia?

2. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Terhadap Prinsip Perlakuan yang Sama dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Berdasarkan Hukum Di Indonesia?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan Pengaturan Terkait Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait Pengaruh Kebijakan Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Berdasarkan Hukum Di Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian, terdiri atas:

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaturan Terkait Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia; dan

2. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kebijakan Terhadap Prinsip Perlakuan yang Sama dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Berdasarkan Hukum Di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh

¹ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²

Jika dikaitkan dengan mengapa investor membutuhkan kepastian hukum, sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada peraturan-peraturan hukum investasi, ada juga ketentuan lain yang dapat terkait dan tidak bisa di lepaskan begitu saja, banyaknya ketentuan akan menjadi pertimbangan bagi Investor, sebagaimana Charles Himawan menegaskan Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku. Untuk meman-Faatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum."

² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

2. Kerangka Konsep

Kegiatan penanaman modal diatur Undang-undang No. 25 Tahun 2007. Dasar pertimbangan peraturan tersebut ialah (1) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;

- 1) Mewujudkan Demokrasi Ekonomi,
- 2) Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998;
- 3) Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi ril dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang

ditanam.³ Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah mgara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kata penanaman modal atau investasi secara etimologi berasal dari kata *'invest'* yang berasal dari Bahasa Latin investor, yang berarti menginvestasikan. Menurut terminologi ekonomi, penanaman modal atau investasi merupakan bentuk dari menabung, yang merupakan keterbalikan dari konsumsi. Lebih luas dapat dikatakan bahwa penanaman modal atau investasi merupakan fundamental dari pertumbuhan ekonomi dan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan di seluruh Masyarakat.

Dalam hukum Indonesia, digunakan istilah penanaman modal. Pengertian penanaman modal mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007, yang menyatakan *penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*. Berdasarkan pengertian tersebut, tidak terlihat adanya perbedaan antara penanaman modal secara langsung dan penanaman modal secara tidak langsung. Maka untuk mengetahui hal tersebut, dapat mengacu ke Penjelasan Pasal 2 UU yang sama. Penjelasan tersebut berbunyi:

³ Departemen Pendidikm dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke 4, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386.

"Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Sedangkan dari kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi terhadap penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*foreign direct investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*capital market*).⁴

Penanaman modal asing berasal dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Dimana pengertian penanaman modal asing tertuang dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

⁴ Sembiring Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Cetakan ke 1, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 55

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967 tidak menelaskan secara khusus yang dimaksud dengan penanaman modal asing, karena undang-undang tersebut hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut dan dapat dilihat dalam doktrin.

Sementara itu, uraian diatas dapat ditarik beberapa unsur, meliputi yakni:

- 1) Penanaman modal asing secara langsung;
- 2) Digunakan untuk menjalankan perusahaan;
- 3) Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang;
- 4) Penanam modal menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.⁵

Sedangkan, pengertian modal asing dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1967 sebagaimana tertuang dalam pasal 2 yaitu:

- 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- 2) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiavai dari kekayaan devisa Indonesia.

⁵ Harjono Dhaniswara K, *Hukum penanaman modal*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 124

- 3) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Adapun Penjelasan pasal 2 bahwa modal asing dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1967 ini tidak hanya berbentuk valuta asing saja, melainkan pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dapat dipergunakan Kembali di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal merumuskan bahwa, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, maka pengertian penanaman modal asing dalam undang-undang tersebut hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.⁶

⁶ L.G Rai Widjaya, 2000, *Penanaman modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 25

Sedangkan apa yang diatur dalam pasal 1 Bab I undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanam modal dalam ilmu hukum dikenal sebagai penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan pembentuk undang-undang dan terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran otentik bertujuan untuk menghindari adanya penafsiran lain atau penafsiran luas. Terhadap beberapa hal penting yang dimuat dalam uu penanaman modal sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam aplikasinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tahapan-tahapan atau prosedur yang didayagunakan guna memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dengan kata lain, metode penelitian ialah metode sistematis guna mengembangkan pengetahuan. Metode dari sebuah penelitian merupakan komponen yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap penelitian sangat membutuhkan bagaimana sebuah metode yang penting yang memuat mengenai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan

penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.⁷

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 35

b. Sumber data

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:⁸

1) Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan

⁸ Ibid, Hlm . 97

meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori, landasan konseptual dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul.

BAB III , Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama yaitu Pengaturan Terkait Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia.

BAB IV, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Pengaruh Kebijakan Terhadap Prinsip Perlakuan yang Sama dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Berdasarkan Hukum Di Indonesia.

BAB V, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta Rekomendasi yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.